



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Taman Suropati Nomor 2, Jakarta 10310
Telepon (+6221) 31936207, 3905650; Faksimile (+6221) 3145374
www.bappenas.go.id

Nomor : B-13176/P.01/DL.03.02/07/2023 Jakarta, 13 Juli 2023
Sifat : Segera
Lampiran : 5 (lima) berkas
Hal : Pemanggilan Calon Peserta Pelatihan
Fungsional Perencana Ahli Pertama Tahun 2023

Yth.

1. Kepala Biro Kepegawaian/Sumber Daya Manusia Kementerian/Lembaga
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

Menindaklanjuti surat kami Nomor B-06347/P.01/DL.03.01/03/2023 tanggal 12 April 2023 perihal Penawaran Program Pelatihan Fungsional Perencana Ahli Pertama, bersama ini disampaikan bahwa Staf Saudara, sebagaimana daftar terlampir, telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti pelatihan Fungsional Perencana Ahli Pertama Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelatihan Fungsional Perencana Ahli Pertama akan dilaksanakan secara daring pada 24 Juli 2023 hingga 8 September 2023 oleh Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan (P2KP), Universitas Hasanuddin.
2. Selama pelaksanaan Program Pelatihan Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas tersebut, peserta diwajibkan untuk selalu menyalakan video selama proses pelatihan berlangsung dengan tingkat kehadiran minimal 90 persen. Satu sesi = 2 jam pelajaran (jampel), dengan masing-masing jampel berdurasi 45 menit
3. Pemberian sertifikat kelulusan kepada peserta harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
a). Memenuhi tingkat kehadiran sebagaimana disebutkan pada poin 2; b). Memenuhi nilai minimum evaluasi pembelajaran (kuis, *post-test*, presentasi, penugasan lainnya baik secara individu maupun berkelompok), serta telah mengisi seluruh kuesioner dari Pusbindiklatren dan penyelenggara pelatihan; dan c). Mengikuti seluruh program pelatihan dengan baik dan dinyatakan memenuhi minimum kehadiran yang ditentukan. Dalam hal peserta gagal memenuhi persyaratan dalam poin a dan b, maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan sertifikat keikutsertaan dalam pelatihan
4. Pembiayaan Program Pelatihan Fungsional Perencana Ahli Pertama Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2023 melalui mekanisme *cost sharing*. Pusbindiklatren menanggung *tuition fee*, tunjangan paket data dan komunikasi, biaya bahan, biaya sewa ruang meeting virtual serta biaya pengawas sesuai dengan ketentuan pelaksanaan pelatihan Pusbindiklatren Bappenas. Sedangkan Instansi asal peserta menanggung biaya lain yang tidak ditanggung oleh Pusbindiklatren untuk menunjang pelaksanaan pelatihan.

5. Seluruh...

5. Seluruh calon peserta diwajibkan untuk mengunggah Surat Tugas dan Surat Pernyataan Kesiapan (format terlampir), **selambat-lambatnya pada tanggal 17 Juli 2023** melalui <http://sipena.bappenas.go.id>. Informasi panduan penggunaan aplikasi SIPENA dapat diakses melalui tautan <https://link.bappenas.go.id/panduan-sipena>.
6. Berkaitan dengan hal tersebut, mohon Saudara dapat menyampaikan informasi dan menerbitkan Surat Tugas untuk yang bersangkutan. Informasi lebih lanjut perihal pelaksanaan pelatihan secara bauran, dapat menghubungi Sdr. Naila Sukma Aisya melalui email pusbindiklatren@bappenas.go.id atau Sdr. Marwah (CP P2KP Unhas) di nomor 081342990474

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Tembusan:

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan (P2KP), Universitas Hasanuddin;
3. PPK Program PPN X, Kementerian PPN/Bappenas.



Lampiran 1 : Daftar Tujuan
Nomor : B-13176/P.01/DL.03.02/07/2023
Tanggal : 13Juli 2023

DAFTAR TUJUAN

1. Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
2. Kementerian Perhubungan;
3. Lembaga Administrasi Negara;
4. Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
5. Pemerintah Kabupaten Luwu;
6. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
7. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara;
8. Pemerintah Kabupaten Melawai;
9. Pemerintah Kabupaten Sumenep;
10. Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
11. Pemerintah Kota Banjar;
12. Pemerintah Kota Manado;
13. Pemerintah Provinsi Bali;
14. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
15. Pemerintah Provinsi Maluku;
16. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Lampiran 2 : Hak dan Kewajiban Peserta
Nomor : B-13176/P.01/DL.03.02/07/2023
Tanggal : 13 Juli 2023

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Kewajiban dan tugas dari peserta pelatihan adalah sebagai berikut:

- a. menyediakan dokumen pendukung pertanggungjawaban pengeluaran (jika dibutuhkan);
- b. menyiapkan alat pendukung untuk mengikuti pelaksanaan pelatihan;
- c. mengikuti seluruh rangkaian agenda pelaksanaan program pelatihan sesuai dengan ketentuan;
- d. mengikuti pelatihan dengan minimal tingkat kehadiran sesuai ketentuan, yakni minimal 90 persen dari jumlah jam pelajaran;
- e. dalam hal berhalangan atau perlu meninggalkan kegiatan pelatihan karena kepentingan pribadi yang mendesak, peserta wajib mendapatkan izin dari pelaksana pelatihan;
- f. menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti semua biaya yang dikeluarkan oleh Pusbindiklatren apabila tidak mengikuti ketentuan yang berlaku selama pelatihan;
- g. mengisi kuesioner pelaksanaan pelatihan yang ditentukan oleh Pusbindiklatren;
- h. menyampaikan/mengunggah surat tugas dan surat kesediaan mengikuti pelatihan (Lampiran 4);

Adapun hak dari peserta pelatihan adalah sebagai berikut:

- a. mendapatkan pelatihan sesuai kurikulum;
- b. mendapatkan bahan pelatihan;
- c. mendapatkan akun dan akses ke dalam Sipena;
- d. mendapat dokumen kelulusan/penyelesaian pelatihan sesuai dengan ketentuan tiap-tiap pelatihan

Lampiran 3 : Hak dan Kewajiban Instansi
Nomor : B-13176/P.01/DL.03.02/07/2023
Tanggal : 13 Juli 2023

HAK DAN KEWAJIBAN INSTANSI PESERTA PELATIHAN

Kewajiban dan tugas dari instansi pengirim peserta pelatihan adalah sebagai berikut:

- a. memberikan dukungan kelengkapan dokumen administrasi pelatihan yang disyaratkan Pusbindiklatren dan atau pelaksana pelatihan; serta
- b. memberikan dukungan pembiayaan (*co-funding*) sesuai dengan kebutuhan dengan merujuk kepada Surat Edaran (SE) Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembiayaan Bersama (*cost sharing*) Dalam Penyelenggaraan Program Beasiswa Kementerian PPN/Bappenas.

Adapun hak dari instansi pengirim peserta pelatihan adalah sebagai berikut

- a. mendapatkan peserta yang telah memiliki kompetensi di bidang perencanaan sesuai dengan jenjangnya untuk Pelatihan Fungsional Perencana;
- b. mendapatkan informasi terkait pelaksanaan pelatihan dari Pusbindiklatren dan/atau pelaksana pelatihan.

Lampiran 4 : Surat Kesediaan Peserta
Nomor : B-13176/P.01/DL.03.02/07/2023
Tanggal : 13 Juli 2023

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PESERTA PROGRAM PELATIHAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Alamat Kantor :
Telp :email resmi kantor (**.go.id).....
No Handphone :email pribadi (***.com).....
Pelatihan :
Pelaksana Pelatihan :

Menyatakan bahwa:

1. Bersedia untuk mengikuti Beasiswa Program Pelatihan Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2023. Apabila saya **mengundurkan diri setelah batas waktu** yang ditetapkan dalam surat pemanggilan, saya bersedia mengganti seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Pusbindiklatren dalam pelaksanaan Beasiswa Program Pelatihan Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2023.
2. Bersedia mengikuti seluruh proses pelatihan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan Pusbindiklatren Bappenas dan Pelaksana Pelatihan, termasuk tidak melaksanakan pekerjaan rutin di kantor selama pelatihan berlangsung.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Pimpinan Instansi (Minimal Eselon II)

Yang Berjanji,

(Cap Basah stempel)

(Tanda tangan dan Meterai 10.000)

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Lampiran 5 : Daftar Nama Peserta
Nomor : B-13176/P.01/DL.03.02/07/2023
Tanggal : 13 Juli 2023

DAFTAR PESERTA PELATIHAN FUNGSIONAL PERENCANA AHLI PERTAMA TAHUN 2023

NO	NAMA	NIP	INSTANSI	UNIT KERJA	KOTA/KAB	PROV
1	Anggaditya	199002202020121002	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	Bappeda	Kabupaten Tulungagung	JATIM
2	Aswita Wiryadisuria	199504282020122005	Pemerintah Kabupaten Luwu Utara	Bappelitbangda	Kabupaten Luwu Utara	SULSEL
3	Bella Novisa Anggraeni	199611262020122014	Kementerian Perhubungan	Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN	Kota Jakarta Pusat	DKI
4	Dimas Arya Putra	199402092020121006	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	Bappeda	Kabupaten Tulungagung	JATIM
5	Diza Wahyu Ananta	199110242019031001	Pemerintah Kabupaten Sumenep	Bappeda	Kabupaten Sumenep	JATIM
6	Eka Aprilia Fitrianti	199104202020122011	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bappeda	Kota Mataram	NTB
7	Faizin Rumakat	199104142020121003	Pemerintah Provinsi Maluku	Bappeda	Kota Ambon	MALUKU
8	Fera Perdina Waani	199102242019032004	Pemerintah Kota Manado	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Manado	SULUT

NO	NAMA	NIP	INSTANSI	UNIT KERJA	KOTA/KAB	PROV
9	Feyby Siska Sandag	198802232019032004	Pemerintah Kota Manado	Dinas Kesehatan	Kota Manado	SULUT
10	Gusti Ayu Putu Candra Dewi	198705122020122004	Pemerintah Provinsi Bali	BKPSDM	Kota Denpasar	BALI
11	Marianne Walukow	199001182019032003	Pemerintah Kota Manado	Bapelitbangda	Kota Manado	SULUT
12	Meita Rachmadian	199505182020122014	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kabupaten Tulungagung	JATIM
13	Melany Febrina Lumi	199102202019032004	Pemerintah Kota Manado	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Kota Manado	SULUT
14	Muhammad Iman Santoso	199203062020121004	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	Bappeda	Kabupaten Tulungagung	JATIM
15	Nathania Kristanti	199509162019032006	Pemerintah Kota Manado	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kota Manado	SULUT
16	Nur Hidayah	199710092020122001	Pemerintah Kabupaten Luwu Timur	Dinas Perikanan	Kabupaten Luwu Timur	SULSEL
17	Nur Ovaliani	198811072018012002	Lembaga Administrasi Negara	Politeknik Stia Lan Makassar	Kota Makassar	SULSEL
18	Resha Gita Prahara Sjafrudhin Putra	199001242019031003	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	Biro SDM	Kota Gorontalo	GORONTALO
19	Riki Irmawan	199510182020121006	Pemerintah Kota Banjar	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kota Banjar	JABAR

NO	NAMA	NIP	INSTANSI	UNIT KERJA	KOTA/KAB	PROV
20	Rismawati	199607252020122002	Pemerintah Kabupaten Luwu	Bappelitbangda	Kabupaten Luwu	SULSEL
21	Salma Nisa Adiyani	199612162020122028	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah		KALSEL
22	Slamet	199202152020121009	Pemerintah Kabupaten Kayong Utara	Bappedalitbang	Kabupaten Kayong Utara	KALBAR
23	Sri Hartati	198503092019032002	Pemerintah Kabupaten Kayong Utara	Bappeda Litbang	Kabupaten Kayong Utara	KALBAR
24	Umi Faridlotun Nasikhah	199507292019032002	Pemerintah Kabupaten Melawai	Bappeda		0
25	Virna Fretty Kuhu	198910042019032001	Pemerintah Kota Manado	Bapelitbangda	Kota Manado	SULUT